

PENGANTAR REDAKSI

Elite dan Kekuasaan

“In so far as national events are decided, the power elite are those who decide them.”

(Mills 1956)

Penggalan kutipan C. Wright Mills di atas menggambarkan bahwa konsep elite tidak pernah lepas dari politik. Jika politik identik dengan urusan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi maka elite adalah sekelompok kecil orang-orang yang terlibat di dalam urusan-urusan tersebut. Dalam studi ilmu politik, seberapa besar pengaruh elite dapat terlihat dari perdebatan antara teori elite dan pluralisme. Teori elite membantah pandangan pluralisme klasik yang menganggap bahwa kekuasaan didistribusikan dengan setara. Menurut para ilmuwan yang mencetuskan teori elite klasik (Pareto, Mosca, Michels hingga Weber), kekuasaan justru terkonsentrasi di dalam sedikit kelompok atau individu.

Dalam kasus Indonesia, studi tentang elite dan kontrol terhadap kekuasaan sering kali membahas perubahan arena elite di era Reformasi. Elite Orde Baru yang pada awalnya bersaing di Jakarta sebagai pusat pemerintahan kemudian berkompetisi di tingkat regional melalui ruang-ruang baru yang disediakan oleh desentralisasi (Hadiz 2003). Salah satu ilustrasi yang dapat dijadikan contoh untuk melihat praktek perebutan kekuasaan antara elite pusat dan daerah akan dijelaskan melalui artikel Ali Muhyidin dalam nomor ini.

Jika dilihat benang merahnya, artikel-artikel di dalam nomor ini secara garis besar membahas isu-isu mengenai elite dan kekuasaan. Artikel-artikel yang dimaksud antara lain berbicara tentang proses tarik menarik kepentingan dalam tata kelola hutan di era desentralisasi (dalam artikel Ali Muhyidin), upaya mempertahankan kekuasaan Erdoğan di Turki (dalam artikel Abdul Hafizh Karim dan Hamdan Basyar), kekalahan elite dalam pemilihan kepala desa (dalam artikel Endik Hidayat,

Budi Prasetyo, dan Setya Yuwana), kemunculan unsur-unsur populisme Islam dalam kontestasi politik di Jakarta (dalam artikel Rangga Kusumo dan Hurriyah), dan adaptasi Partai Komunis Vietnam dalam mempertahankan sistem negara satu partai (dalam artikel Hilwan Givari).

Sama halnya dengan edisi-edisi sebelumnya, nomor ini terdiri dari 5 (lima) artikel dan 1 (satu) resensi. Jurnal ini dimulai dengan artikel yang ditulis oleh Ali Muhyidin dengan judul *“Guarding Central Government Control over Forest: Forest Governance in the Post-Decentralization Indonesia”* yang mengulas bagaimana kontestasi kewenangan dalam hal manajemen kebijakan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan reformasi tata kelola hutan menjadi setengah hati. Hal ini disebabkan oleh resistensi pemerintah pusat untuk melakukan reformasi. Daripada mengakomodasi dan memperkuat kemampuan pemerintah di tingkat lokal, pemerintah pusat justru berupaya memperkuat kekuasaannya.

Artikel kedua berjudul *“Perwujudan Competitive Authoritarianism di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017”*. Artikel ini mendiskusikan mengenai implementasi nilai-nilai otoritarianisme kompetitif yang dilakukan oleh rezim Erdoğan di Turki. Artikel ini berpendapat bahwa Presiden Erdoğan melakukan upaya pelemahan kepada kelompok oposisi, yaitu represi terhadap media, pelanggaran kebebasan sipil, dan indikasi kecurangan dalam proses pemungutan suara untuk memastikan kekuasaannya melalui referendum.

Artikel ketiga bertajuk *“Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri”*. Artikel ini membahas tentang fenomena kegagalan oligarki, yang memiliki kekuatan ekonomi dan menguasai institusi formal, dalam memenangkan pemilihan kepala desa di Desa Tanjung, Kabupaten Kediri. Menurut artikel ini, terdapat sumber kekuasaan lain yang berperan dalam kontestasi pemilihan kepala desa di daerah tersebut, yaitu sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Hal ini berbeda dengan pertarungan politik di tingkat yang lebih tinggi (kabupaten, kota, provinsi, dan nasional) di mana peranan sumber kekuasaan material kerap

kali menjadi faktor yang signifikan dalam memperoleh keuntungan elektoral.

Artikel keempat yang berjudul “*Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017*” menjelaskan mengenai kebangkitan unsur-unsur populisme Islam di tengah-tengah pilkada DKI Jakarta 2017 melalui mobilisasi massa yang disebut sebagai “Aksi Bela Islam”. Menurut artikel ini, walaupun Aksi Bela Islam memiliki elemen-elemen populisme seperti aliansi multikelompok, gerakan ini tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai populisme Islam seperti yang dijelaskan oleh para ilmuwan politik. Hal ini dikarenakan oleh keberlangsungan aksi yang hanya bertahan sebentar. Selain itu, perbedaan seruan di antara peserta aksi juga menjadi salah satu hambatan dalam mempersatukan identitas peserta sebagai bagian dari ‘umat’.

Artikel kelima berbicara mengenai sifat adaptif partai penguasa pada era reformasi ekonomi di Vietnam. Dengan judul “*Adaptasi Sirkulasi Patron dalam Implementasi Sentralisme Demokratik Partai Komunis Vietnam dalam Kongres pada era “Doi Moi”*”, artikel yang ditulis oleh Hilwan Givari ini menjelaskan tentang keberhasilan Partai Komunis Vietnam dalam mengakomodasi tuntutan reformasi dan kepentingan pragmatis para elite melalui penerapan prinsip sentralisme demokratik. Menurut Givari, berbeda dengan negara-negara komunis lain, mekanisme sentralisme demokratik menjadi alasan mengapa partai komunis di Vietnam mampu mempertahankan sistem negara satu partai dalam waktu yang relatif lama.

Bagian terakhir dari Jurnal Politik edisi kali ini adalah resensi buku Paul McMahon yang berjudul “*Berebut Makan: Politik Baru Pangan*”. Resensi ini ditulis oleh Fikri Disyacitta dengan judul “*Pangan yang Politis: Masalah, Dampak, dan Solusi*”. Dalam resensi ini, Disyacitta mengulas mengenai aspek politik di dalam isu pangan dari tingkat lokal hingga internasional. Selain itu, Disyacitta juga mengapresiasi buku yang ditulis oleh McMahon karena mampu bersikap kritis dan tidak terperangkap dengan pandangan lama yang menyatakan bahwa ketimpangan pangan di dunia secara sederhana hanya diakibatkan oleh

perilaku negara-negara maju. Menurut Disyacitta, buku McMahon sukses dalam memberikan cara pandang lain dalam melihat posisi dan peran negara berkembang dalam menanggapi persoalan pangan yang langka. Namun, Disyacitta juga mengkritik tulisan McMahon yang dianggap tidak memiliki perspektif yang baru.

Sebagai penutup, redaksi sangat berharap semoga terbitan ketujuh dari Jurnal Politik dapat menjadi stimulus dalam diskusi-diskusi akademis serta memberikan manfaat bagi para pembaca. Selamat membaca!

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiz, Vedi R. 2003 “Power and Politics in North Sumatra: The Uncompleted Reformasi” dalam *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, ed. Edward Aspinall dan Greg Fealy. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 119-131.
- Mills, C. Wright. 1956. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.